

PEMBENTUKAN PANSUS, 5 HLM.

2023

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 171/1521/Kep-DPRD /1/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

- ABSTRAK        -        Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu bidang usaha yang memiliki peran strategis untuk meraih kedaulatan ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi kerakyatan menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2027 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Untuk melindungi, mengembangkan serta meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar lebih tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, Proporsional dan berkesinambungan serta saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- CATATAN        :        -        Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.